

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 46

2013

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, perlu adanya pengaturan lebih lanjut berupa petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Dispenda Kota Bekasi Nomor 002.6/581.1 Dispenda/IX/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Pejabat sesuai kewenangan adalah Pejabat berdasarkan tugas dan wewenangnya yang diatur terpisah terkait penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD dan penetapan atas SKK pajak daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Kota Bekasi.
12. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas yang kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
13. Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
14. Sistem *self assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
15. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

16. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
17. Pengusahahotel/penanggung jawab adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan penyediaan jasausaha hotel baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Rumah Kos adalah penginapan yang memiliki skala jangka waktu tertentu yang memungut bayaran dan memenuhi kriteria satu luasan/satu hamparan dengan satu kepemilikan, adanya fasilitas pendingin udara (AC), adanya fasilitas MCK di dalam kamar dan/atau memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk tempat tidur.
19. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
24. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah kantor pelayanan piutang dan lelang negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan selanjutnya disingkat SKK adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan Hotel.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan hotel yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pasal 4

- (1) Subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian kedua

Tata cara Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya atas objek Pajak Hotel dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD Pendapatan untuk diteruskan ke bidang yang mempunyai fungsi pendaftaran.
- (2) Pendaftaran objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran atas pelayanan yang disediakan di Hotel.

- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak Hotel atau pengusaha hotel/penanggung pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Dinas/UPTD Pendapatan;
 - b. dikirim oleh petugas Dinas/UPTD Pendapatan; dan
 - c. dapat mengakses secara online pada *website* Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Formulir Pendaftaran wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. foto copy identitas diri (KTP/SIM/paspor);
 - b. foto copy akte pendirian untuk Badan Usaha;
 - c. foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dan/atau surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - d. setiap foto copy yang merupakan persyaratan pendaftaran usaha atau objek pajak Hotel harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya kepada petugas.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD Pendapatan untuk diteruskan ke bidang yang mempunyai fungsi pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Usaha Hotel beroperasi.
- (6) Bagi Wajib Pajak Hotel yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Kartu NPWPD.
- (7) Kepala Dinas melalui bidang yang mempunyai fungsi pendaftaran dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak Hotel tidak menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penerbitan NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak Hotel.

BAB III TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD

Bagian Kesatu Tata Cara Pengisian

Pasal 6

- (1) Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, wajib pajak memenuhi kewajiban Pajaknya dengan menggunakan SPTPD.

- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan Jelas, benar dan lengkap serta menandatangani.
- (3) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke Dinas, atau dapat mengakses secara online pada *website* Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data wajib pajak;
 - b. alamat wajib pajak / perusahaan;
 - c. jenis usaha;
 - d. jumlah omzet dan pajak terutang; dan
 - e. fasilitas penunjang yang disediakan dengan pembayaran.

Bagian Kedua Penyampaian SPTPD

Pasal 7

- (1) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), lembar 1 (kesatu) untuk UPTD Pendapatan, lembar 2 (kedua) untuk bidang yang mempunyai fungsi penetapan, lembar 3 (ketiga) untuk Bendahara Penerimaan, lembar 4 (keempat) untuk wajib pajak dan lembar 5 (kelima) bidang yang mempunyai fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Dinas paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan pada batas waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (2), Dinas menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak, di dahului teguran oleh UPTD Pendapatan.

BAB IV PENETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota Bekasi dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan melalui mekanisme pemeriksaan lapangan, dan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana di maksud pada ayat(3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) Kewenangan dalam penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana ayat (1) :
 - a. sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), menjadi kewenangan kepala Bidang atas nama Kepala Dinas Pendapatan;

- b. di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota;
- c. di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi kewenangan Walikota.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1(satu)hari kerja.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
- (4) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan kahar dan kondisi tertentu Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang.

- (2) keadaan kahar dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perang saudara;
 - b. invasi dari negara lain;
 - c. bencana alam;
 - d. pemberontakan;
 - e. hal hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
 - f. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak Hotel yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, foto copy SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pengangsuran dan penundaan pajak untuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengangsuran dan penundaan pajak;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui, dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - e. pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran; dan
 - f. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKBT dan STPD, kecuali atas pertimbangan tertentu ditetapkan lain oleh Walikota;
 - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Pajak Terutang
Pasal 11

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;

- b. Kepala Dinas selaku Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau penanggung jawab Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Dinas selaku Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Kepala Dinas selaku Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - e. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;
 - f. Kepala Dinas selaku Pejabat yang ditunjuk, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

Kewenangan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak:

- a. sampai dengan Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (atas nama Walikota);
- b. diatas Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) sampai dengan dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi kewenangan Walikota;
- c. diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kewenangan Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak.
- a. yang ditimpa pailit atau bangkrut berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga.
 - b. diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar.

Pasal 15

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur sebagai berikut :

- a. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling kurang memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 2. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan
 3. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Penanggung Pajak;
 - c) SSPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD.
 - d) fotocopy Surat Keputusan Pailit/Bangkrut yang dikeluarkan Pengadilan Niaga dan atau surat keterangan dalam keadaan kahar dari pejabat yang berwenang.
- b. tidak memiliki tunggakan pajak bulan sebelumnya.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak untuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;
- d. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dikabulkan, maka Pejabat sesuai kewenangan menerbitkan surat keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;
- e. apabila permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak ditolak, Pejabat sesuai kewenangan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- f. keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. terhadap pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pembatalan penetapan untuk menerbitkan salinan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN;
 - c. terhadap Pembetulan ketetapan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
 - d. hasil Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;
 - e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan;
 - f. dengan diterbitkannya Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN maka terhadap SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN semula dinyatakan batal dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - g. surat SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan

- h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan tetap dan atau tidak ada pembetulan, maka Kepala Dinas segera menerbitkan tanggapan atau jawaban dan disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak, selambat lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Pejabat sesuai kewenangannya atau Kepala Dinas melaksanakan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan.
- (4) Sebelum diterbitkannya keputusan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pembatalan penetapan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang telah diterbitkan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pembatalan ketetapan;
 - c. menyusun dan menyerahkan laporan berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
- (5) Atas laporan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (4), maka pejabat sesuai kewenangannya menerbitkan tanggapan atau Keputusan atas permohonan tersebut.
- (6) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak diterima, maka pejabat sesuai kewenangannya dan atau melalui Kepala Dinas memerintahkan Pejabat yang ditunjuk dan sesuai tugas fungsinya untuk menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang baru serta memberikan tanda atau coretan silang pada lembar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang lama serta selanjutnya diberi catatan atau keterangan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan
Pasal 18

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan lapangan dan adanya temuan.
- (3) Sebelum diterbitkannya keputusan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN yang telah diterbitkan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan;
 - c. menyusun dan menyerahkan laporan berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
- (4) Atas laporan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pejabat sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan atas permohonan pengurangan tersebut.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan ketetapan pajak diterima, maka pejabat sesuai kewenangannya memerintahkan Pejabat yang ditunjuk dan sesuai tugas fungsinya untuk menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN yang baru serta memberikan tanda atau coretan silang pada SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau SKPDN yang lama serta selanjutnya diberi catatan atau keterangan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan;
 - b. hasil Keputusan diterimanya keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, atau ;
 - c. hasil putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- (3) Sebelum SKPDLB diterbitkan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, melakukan pemeriksaan dan penelitian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan selambat-lambatnyadalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila Wajib Pajakatau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 20

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahunsebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Dinas mengajukan Surat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KADALUARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat yang ditunjuk membuat laporan telaahan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari wajib pajak untuk diterima atau tidak diterima.
- (4) Dalam hal hasil penelitian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, maka Pejabat sesuai kewenangannya segera menerbitkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (5) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Ketetapan Pajak atau STPD atau Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (6) Kewenangan dalam pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi :
- sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), menjadi kewenangan kepala Bidang atas nama Kepala Dinas Pendapatan;
 - di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Walikota;
 - Di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menjadi kewenangan Walikota;

Bagian Kedua Penghapusan Kadaluarasa Penagihan

Pasal 22

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa :

- Kepala Dinas melakukan pemeriksaan daftar Wajib Pajak yang memilikipiutang.
- berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas membuat daftar Wajib Pajak yang dapat dihapuskan piutangnya.
- Kepala Dinas mengajukan daftar Wajib Pajak yang akan dihapuskan piutangnya kepada Walikota yang telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.
- atas usul Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila telah memenuhi ketentuan, maka Walikota menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN Hotel.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto copynya;
 - e. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan masa Pajak;
 - f. melampirkan perhitungan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar pertimbangan terhadap SKPDLB;
 - g. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Hotel dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (3). Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah tanggal diterimanya surat oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, Kepala Dinas dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 26

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % perbulan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jika pengajuan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sepanjang pajak yang terutang setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sepanjang pajak yang terutang lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sepanjang pajak yang terutang lebih besar dari Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam hal kewenangan pemberian keputusannya berada pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota atau Sekretaris Daerah dalam hal kewenangan pemberian keputusannya berada pada Walikota atau Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Kepala Dinas Pendapatan Daerah meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Walikota atau Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama :

- a. 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b; atau
- b. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf b.

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Pejabat sesuai kewenangannya wajib memberikan tanggapan atau pembetulan atau pengurangan atau ketetapan terhadap objek keberatan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (2) Apabila jangka waktu dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, maka keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dinyatakan diterima

Bagian Kedua Bandung

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap hasil atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1).
- (2) Permohonan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender sejak Keputusan keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 33

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan hanya diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa berdasarkan:
 - a. penetapan Hakim Pengadilan Pajak atas surat pernyataan pencabutan yang diajukan oleh pembanding sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Hakim Pengadilan Pajak melalui pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutan yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB XI PEMBUKUAN Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib membuat pencatatan.

- (2) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib membuat pembukuan.
- (3) Pembukuan paling sedikit membuat data dan informasi keuangan yang meliputi:
 - a. harta;
 - b. kewajiban;
 - c. modal;
 - d. penghasilan dan biaya; dan
 - e. harga.
- (4) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun dengan menggunakan standar akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 46 SERI E